

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 601-606
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12750241>

Pengawasan Terhadap Perbaikan Infrastruktur Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sukabumi

Mohammad Ichsan Abdillah^{1*}, Karlina Appandi², Mila Meliani³, Piranti Amara⁴, Ivan Darmawan⁵

¹²³⁴⁵Universitas Padjadjaran, Sumedang

*Email korespondensi: mohammad20007@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Perbaikan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sukabumi perlu diprioritaskan untuk menjamin kualitas, ketepatan waktu, dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek bangunan. Kebijakan ini berfokus pada pelatihan karyawan, kualitas material, dan kesesuaian kerja berdasarkan tujuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui perencanaan yang ringkas dan menyeluruh, diharapkan mampu mengurangi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan perbaikan infrastruktur. Hasil penelitian ini juga memberikan informasi berharga bagi penelitian dan pelaksanaan proyek di masa depan, sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan lancar dan efisien serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat umum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah data dari jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat dua jenis pengawasan dalam perbaikan infrastruktur yaitu preventif dan representatif di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sukabumi.

Kata kunci: *Pengawasan, Infrastruktur, Kabupaten Sukabumi*

Abstract

Infrastructure improvements at the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Department of Sukabumi Regency need to be prioritized to ensure quality, timeliness and efficiency in implementing building projects. This policy focuses on employee training, material quality, and work suitability based on previously established objectives and technical specifications. Through concise and comprehensive planning, it is hoped that it will be able to reduce bureaucracy, increase accountability and increase transparency at every stage of infrastructure improvement. The results of this research also provide valuable information for future research and project implementation, so that infrastructure development in Sukabumi Regency can run smoothly and efficiently and provide maximum benefits to the general public. The data collection method used in this research is library research, by reading, recording and processing data from journals, articles and relevant documents. The results of this research are that there are two types of supervision in infrastructure repairs, namely preventive and representative at the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Department of Sukabumi Regency.

Keywords: *Supervision, Infrastructure, Sukabumi Regency*

Article Info

Received date: 15 June 2024

Revised date: 28 June 2024

Accepted date: 8 July 2024

PENDAHULUAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah merupakan lembaga pemerintah daerah yang berkomitmen penuh untuk membangun, memelihara, dan memperluas infrastruktur serta ruang penataan di wilayahnya. Dinas ini memiliki sumber daya penting untuk mengelola proyek seperti pembangunan gedung-gedung publik, pembangunan infrastruktur, pembangunan jembatan, dan sistem drainase. Selain itu, Dinas PUPR juga menjelaskan dan mempraktekkan rencana tata ruang untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan tepat waktu, serta mengintegrasikan komponen kualitas udara, seperti pemurnian udara dan irigasi. Mengenai pelaksanaan proyek-proyek ini, pengawasan juga penting untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu, serta untuk menjaga anggaran yang bersumber dari masyarakat. Dengan cara ini, Dinas PUPR Daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan perencanaan tata guna lahan yang mempunyai dampak negatif jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat umum.

Pembangunan merupakan sebuah usaha perubahan dan pertumbuhan yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, pemerintahan dan negara dalam rangka pembinaan bangsa. pembangunan yang dilakukan harus sudah direncanakan dan diusahakan dengan sadar dengan kata lain pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sudah seharusnya memperhatikan pembangunan dari tingkat paling bawah yaitu, pembangunan pada tingkat desa agar pembangunan pada tingkat nasional bisa tercapai (S.P Siagian : 2012). Pembangunan adalah sebuah upaya yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, pemerintahan dan negara dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan Nasional melalui perubahan dan pertumbuhan secara terancang untuk menuju masyarakat yang modern (S.P Siagian : 2012). Proses pembangunan sudah seharusnya terus berlanjut, hal ini dikarenakan tingkat keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran tidak akan tercapai secara mutlak. pembangunan bisa diartikan juga sebagai sebuah upaya yang terprogram dan harus dilaksanakan secara terus menerus oleh sebuah negara agar bisa terciptanya masyarakat yang lebih baik. pemerintah yang melaksanakan pembangunan sejatinya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Kondisi infrastruktur di bawah pengelolaan Dinas PU memiliki panjang sekitar 1.424.355 KM yang terdiri dari 229 ruas jalan, sedangkan untuk jembatan itu sepanjang 2.396,6 dari jumlah jembatan 204 buah. Jembatan cimandiri yang panjangnya sekitar 60 meter lebar 2,5 meter itu merupakan jembatan penghubung antara dua kabupaten yaitu cianjur dan sukabumi. Yang mengakibatkan ambruknya jembatan cimandiri ini karena derasnya air hujan sehingga mengakibatkan air sungai meluap, kondisi tanah dan pondasi menjadi tidak stabil maka dari itu jembatan yang awalnya kokoh menjadi ambruk. Akibatnya ambruknya jembatan ini mengakibatkan perekonomian masyarakat sekitar menjadi tidak stabil karena kebanyakan dari warga itu bermata pencaharian sebagai berjualan dan petani. Putusnya sling jembatan dan besi-besi patah juga salah satu yang mengakibatkan jembatan ambruk.

Dinas Pengerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sukabumi, menjelaskan bahwa pada 2024 mencanangkan mengeluarkan anggaran sebesar Rp 14.257.809.015 untuk perbaikan jalan, jembatan dan kegiatan lainnya. Dari data yang tercatat Dinas PUPR Sukabumi, saat ini terdapat 154 ruas jalan dengan panjang 117,796 kilometer. Dari jumlah total jalan yang berstatus Kota Sukabumi, pemantapan jalan sudah mencapai 86,87 persen. Sementara sisanya, kondisi jalan mengalami tingkat kerusakan ringan hingga sedang.

Ruas jalan rusak sepanjang 90 kilometer di Kabupaten Sukabumi diklaim telah selesai diperbaiki oleh pemerintah setempat. Upaya tersebut sebagai bagian merespon harapan warga atas perbaikan jalan di wilayah. Pemkab berupaya aktif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pembangunan. Salah satunya perbaikan jalan rusak yang statusnya milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, tepatnya di ruas Jalan Raya Padabeunghar-Bojong Lopang, Jampang Tengah yang kini sedang diperbaiki. Pihak pemkab juga melibatkan masyarakat supaya ikut andil dalam menjaga jalan yang sudah diperbaiki.

Jalan raya yang menghubungkan Sukaraja – Cireunghas dan Gegerbitung di Kabupaten Sukabumi saat ini memang mengalami kerusakan cukup parah. Nampak banyak sekali aspal yang mengelupas sehingga meninggalkan kerikil, kondisi ini sangat berbahaya untuk para pengguna jalan atau warga sekitar. Dalam memperbaiki jalan ini diperlukan anggaran sebanyak Rp 1,9 Miliar dan direncanakan akan dimulai akhir april 2023, menurut pemerintah skala utama adalah perbaikan jalan rusak atau berlubang. Perbaikan infrastruktur merujuk pada kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas fasilitas fisik dan sistem yang ada untuk memastikan fungsi dan kehandalannya. Perbaikan ini bertujuan untuk memperpanjang umur infrastruktur, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan keselamatan serta kenyamanan pengguna. Perbaikan infrastruktur merupakan sebuah bagian penting dari manajemen aset yang berkelanjutan dan esensial untuk menjaga fungsi dan kualitas layanan yang diberikan oleh infrastruktur tersebut. Perbaikan infrastruktur juga mempunyai beberapa aspek utama didalamnya seperti:

1. Pemeliharaan Rutin: Kegiatan yang dilakukan secara berkala demi menjaga kondisi dan kinerja infrastruktur.
2. Rehabilitasi: Perbaikan yang lebih intensif dan ekstensif dibandingkan pemeliharaan rutin, seringkali melibatkan perbaikan besar atau penggantian bagian dari infrastruktur yang mengalami kerusakan signifikan atau penurunan kinerja.

3. Modernisasi dan Peningkatan: Proses pembaruan dan peningkatan menggunakan teknologi atau metode baru untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas, atau kinerja.
4. Penilaian dan Diagnostik: Kegiatan yang melibatkan inspeksi dan evaluasi kondisi untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan kebutuhan perbaikan.
5. Keamanan dan Kepatuhan: Pastikan bahwa perbaikan dilakukan sesuai dengan standar keselamatan dan peraturan yang berlaku untuk menghindari risiko kecelakaan dan memastikan infrastruktur dapat digunakan dengan aman.

Umumnya, pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dilakukan demi mencapai tujuan dari suatu kebijakan tanpa adanya penyimpangan. Hal tersebut dapat diukur dari bagaimana komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan dari pembangunan infrastruktur tersebut. Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam memperbaiki kerusakan jembatan di Kabupaten Sukabumi tentunya membutuhkan pengawasan agar tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan dalam menanggulangi permasalahan tersebut dapat tercapai. Pada kasus kerusakan jembatan pengawasan yang dilakukan ialah pengawasan politis dan pengawasan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang terus membahas kondisi jembatan baik dalam forum resmi maupun media massa dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (Nugraha 2024)

Pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan masyarakat sejatinya adalah bentuk dari kontrol sosial yang dilakukan dengan berbagai cara diantaranya ialah Pengawasan media sosial, dimana masyarakat dapat menyuarakan keresahan mereka di sosial media guna mempercepat respon dari Pemerintah, pengawasan informal seperti melakukan teguran langsung maupun sanksi sosial terhadap suatu kebijakan, sedangkan pengawasan formal dilakukan dalam bentuk menyampaikan kritik/saran dalam acara resmi seperti musyawarah desa, kemudian melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam kasus kerusakan jembatan di Kabupaten Sukabumi upaya yang dilakukan oleh masyarakat ialah menggunakan media sosial untuk melakukan pengawasan. Hal tersebut dilihat dari salah satu masyarakat yang menjelaskan kondisi Jembatan Lalay yang belum mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi, video tersebut berhasil menembus jutaan viewers dan mendapat respon dari Pemerintah (Lestari 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk memahami implementasi pengawasan pemerintahan secara mendalam melalui literatur-literatur yang sudah ada. Pendekatan studi pustaka dipilih penulis karena memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi yang beragam tanpa terbatas waktu dan tempat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen resmi dan tidak resmi. Sumber data tersebut mencakup laporan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan, undang-undang, dan artikel jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah data dari jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen yang relevan. Penelitian ini dibatasi dengan tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan, tetapi berfokus pada data-data yang telah dikumpulkan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang kurang relevan akan disaring agar menghasilkan data yang lebih terkonsentrasi dan terstruktur. Kemudian data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti tabel atau grafik, maupun narasi yang lebih sistematis. Tahap terakhir dari analisis data yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan, dimana hasil reduksi data akan ditinjau kembali dengan bertumpu pada tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak Geografis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah merupakan lembaga pemerintah daerah yang berkomitmen penuh untuk membangun, memelihara, dan memperluas infrastruktur serta ruang penataan di wilayahnya. Dinas ini memiliki sumber daya penting untuk mengelola proyek seperti pembangunan gedung-gedung publik, pembangunan infrastruktur, pembangunan jembatan, dan sistem drainase. Selain itu, Dinas PUPR juga menjelaskan dan mempraktekkan rencana tata ruang untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan tepat waktu, serta mengintegrasikan komponen

kualitas udara, seperti pemurnian udara dan irigasi. Mengenai pelaksanaan proyek-proyek ini, pengawasan juga penting untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu, serta untuk menjaga anggaran yang bersumber dari masyarakat. Dengan cara ini, Dinas PUPR Daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan perencanaan tata guna lahan yang mempunyai dampak negatif jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat umum.

Tupoksi PUPR

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum. Dinas PU merupakan salah satu aktor dari pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum yang secara langsung dipimpin oleh Kepala Dinas. Artinya, Adanya kerusakan infrastruktur di beberapa titik pada Kabupaten Sukabumi merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan terdapat beberapa tindakan darurat yang diupayakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi 2019)

Pengawasan Preventif

Pencegahan adalah kunci perbaikan infrastruktur. Ini adalah pendekatan preventif yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan menyelesaikannya sebelum menjadi permasalahan yang lebih serius. Pendekatan ini mencakup pemantauan berkala terhadap kondisi fisik infrastruktur, penggunaan teknologi mutakhir seperti sensor dan sistem pemantauan waktu nyata, serta penilaian prosedur kerja dan manajemen proyek. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko bencana non-sukarela, memperpanjang umur infrastruktur, dan memastikan perbaikan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, tindakan pencegahan juga mempersingkat pelatihan dan meningkatkan kapasitas karyawan sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah segera setelah masalah tersebut muncul.

Keberhasilan upaya preventif sangat bermanfaat bagi kolaborasi berbagai pihak terkait, baik pemerintah, kontraktor, maupun masyarakat umum. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekaligus memberikan pandangan tambahan yang berguna kepada masyarakat dapat dicapai jika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga memegang peranan penting dalam perawatan preventif, memungkinkan penyelesaian masalah secara tepat waktu dan efisien. Oleh karena itu, upaya preventif tidak hanya menjamin perbaikan infrastruktur berjalan lancar dan efisien, namun juga memberikan rasa aman dan sejahtera bagi masyarakat umum yang menggunakan infrastruktur tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pengawasan Representatif

Pendekatan yang representatif terhadap perbaikan infrastruktur sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disepakati. Pengawasan ini melibatkan berbagai pihak, terdiri dari pemerintah, organisasi independen, dan masyarakat umum. Tujuan utama Pemerintah adalah menetapkan standar dan peraturan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Organisasi independen seperti auditor dan konsultan berperan sebagai tiga pihak utama yang memberikan penilaian objektif terhadap kinerja dan kualitas hasil kerja. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat juga sama pentingnya untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi penduduk setempat dipertimbangkan dalam setiap proyek perbaikan infrastruktur.

Selain itu, pengawasan representatif juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, seperti korupsi dan penyelewengan dana. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian, risiko penyimpangan dapat diminimalkan. Pelibatan berbagai pihak dalam pengawasan memungkinkan adanya mekanisme check and balance yang efektif. Misalnya, laporan kemajuan proyek yang dipublikasikan secara berkala dapat diakses oleh publik sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaannya. Dengan demikian, pengawasan representatif tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perbaikan infrastruktur tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga terkait.

Pengawasan pekerjaan infrastruktur jalan maupun jembatan yang baik adalah sebuah aspek penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan bidang jalan dan jembatan, fokus utamanya itu

keberhasilan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan fisik. Fungsi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi memiliki beberapa karakter diantaranya :

1. Quality Control berfungsi untuk mengamankan seluruh komponen keseluruhan dan detail (tidak random) agar memenuhi syarat mutu yang berlaku serta dilengkapi daftar simak apa yang akan diperiksa.
2. Quality Assurance ialah kegiatan yang sistematis dan sudah direncanakan yang berlaku dalam sistem mutu, agar bisa menyamakan quality control itu terarah sesuai sasaran dan cukup efektif, secara random dikerjakan control pengamanan kualitas sebagai counter check.
3. Safety Control adalah menekankan pengamanan dalam seluruh proses pekerjaan, secara teknis lebih banyak ke arah mengamankan struktur pekerjaan dan langkah pengendalian risiko dalam pelaksanaan (seperti kecelakaan dan kebakaran).
4. Observasi Berkala itu mengamankan sasaran desain dengan segala konsep, metode asumsi, perilaku struktur, urutan pelaksana, dan observasi cermat serta detail.

SIMPULAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan, pemeliharaan, dan perluasan infrastruktur di wilayahnya. Dalam fungsi dan tugas pokoknya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah harus menjalankan rencana tata ruang dan efisien, serta melakukan pengawasan yang baik bersama masyarakat untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai tanpa adanya penyimpangan. Pencegahan, pengawasan yang representatif, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dalam perbaikan infrastruktur untuk mengidentifikasi masalah, menyelesaikan tepat waktu, memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan anggaran, serta mencegah penyimpangan. Pengawasan juga merupakan kunci penting dari berjalannya seluruh perbaikan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi. Kerusakan yang semakin hari kian bertambah, maka adanya pengawasan akan mengarahkan tujuan baik tercapai dan masyarakat dapat menikmati kembali infrastruktur yang akan mempermudah keberlangsungan hidup masyarakat.

REFERENSI

- (N.d.). Uin-Suska.Ac.Id. Retrieved June 8, 2024, from <https://repository.uin-suska.ac.id/4378/3/BAB%202.pdf>
- Alamsyah, S. (2024, April Selasa, 02). *Perbaikan Jalan di Sukabumi Dikebut*. Diambil kembali dari detikJabar: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7273878/perbaikan-jalan-di-sukabumi-dikebut>
- Budyanto. (2021, November 14). *Slingnya Putus, Warga Ketakutan Jembatan Lalay di Sungai Cimandiri Sukabumi Ambruk*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2021/11/14/222736078/slingnya-putus-warga-ketakutan-jembatan-lalay-di-sungai-cimandiri-sukabumi>
- Geografis Kabupaten Sukabumi*. (2024, Juni 29). Diambil kembali dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi: <https://kejari-sukabumikab.go.id/pelayanan/?menu=Geografis>
- Geografi dan Demografi*. (n.d.). Sukabumikota.go.id. Retrieved June 10, 2024, from <https://portal.sukabumikota.go.id/geografis/>
- Jalaludin, M. R. (2021, Juni Rabu, 23). *Perbaikan Jembatan Cimandiri Telan Anggaran Rp 2,5 Miliar, Lantai Jembatan Diganti dengan Break Past*. Diambil kembali dari Tribun Jabar: <https://jabar.tribunnews.com/2021/06/23/perbaikan-jembatan-cimandiri-telan-anggaran-rp-25-miliar-lantai-jembatan-diganti-dengan-break-past#google%20vignette>
- Lestari, Muji. 2023. "Tak Kunjung Diperbaiki, Kondisi Jembatan Lalay Sukabumi Makin Memprihatinkan." *Tribun Jakarta.com*. <https://jakarta.tribunnews.com/2023/07/03/tak-kunjung-diperbaiki-kondisi-jembatan-lalay-sukabumi-makin-memprihatinkan#googlevignette> (June 13, 2024).
- Nasrul, E. (2023, November Selasa, 28). *Jalan Rusak Sepanjang 90 Kilometer di Sukabumi Diklaim Rampung Diperbaiki*. Diambil kembali dari Republika: <https://news.republika.co.id/berita/s4sf9r451/jalan-rusak-sepanjang-90-kilometer-di-sukabumi-diklaim-rampung-diperbaiki>

- Nugraha, Ilham. 2024. "Jembatan Di Curugkembar Rusak, Anggota DPRD Sukabumi Dorong Pembangunan Layak." *by Redaksi*. <https://jurnalsukabumi.com/2024/05/15/jembatan-di-curugkembar-rusak-anggota-dprd-sukabumi-dorong-pembangunan-layak/#googlevignette> (June 13, 2024)
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. 2019. "DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI." *diskominfo kab.sukabumi*. https://portal.sukabumikab.go.id/web/detail_opd/dinas-pekerjaan-umum.asp (June 11, 2024).
- Rangga. (2023, April 10). *Jalan Rusak Sukaraja Cireunghas sampai Gegerbitung segera diperbaiki*. Diambil kembali dari Sukabumi.Pos: <https://sukabumipos.com/jalan-rusak-sukaraja-cireunghas-sampai-gegerbitung-segera-diperbaiki-bulan-april>
- Supiandi, A. (2022, September Rabu, 14). *Jembatan Cimandiri Ambruk, Jalan Penghubung Cianjur-Sukabumi Terputus*. Diambil kembali dari iNews Jabar: <https://jabar.inews.id/berita/jembatan-cimandiri-ambruk-jalan-penghubung-cianjur-sukabumi-terputus>